

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perubahan kebijakan pendidikan di Indonesia merupakan bagian dari dinamika pembangunan nasional yang terus menyesuaikan diri dengan perkembangan global dan kemajuan teknologi. Pendidikan tidak lagi dipandang hanya sebagai proses transfer pengetahuan, tetapi sebagai instrumen strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, dan kompetitif. Dalam dua dekade terakhir, pemerintah telah melakukan reformasi kurikulum secara bertahap, dimulai dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang memberikan otonomi lebih luas kepada sekolah, kemudian disempurnakan melalui Kurikulum 2013 (K-13) yang menekankan pendekatan saintifik, penguatan karakter, serta pengembangan kemampuan berpikir tingkat tinggi, hingga pada implementasi Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada fleksibilitas pembelajaran dan penguatan kompetensi esensial (Kemendikbud, 2013; Kemendikbudristek, 2022). Transformasi kurikulum tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan nasional bersifat dinamis dan responsif terhadap perubahan lingkungan strategis.

Perubahan kurikulum di Indonesia merupakan respons terhadap tantangan abad ke-21 yang ditandai oleh perkembangan teknologi, digitalisasi, dan globalisasi. Kondisi tersebut menuntut dunia pendidikan untuk menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, serta literasi digital sebagai kompetensi utama abad ke-21 (Trilling & Fadel, 2009; UNESCO, 2018). Oleh karena itu, pemerintah

melakukan transformasi kurikulum melalui implementasi Kurikulum Merdeka sebagai upaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih fleksibel, kontekstual, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik, sehingga mampu menjawab kebutuhan pendidikan di era global (Anderson & Krathwohl, 2001). Transformasi tersebut juga menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyesuaikan sistem pendidikan nasional dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta dinamika kebutuhan masyarakat, sehingga peserta didik diharapkan memiliki kompetensi yang relevan dengan tantangan abad ke-21.

Sebagai tindak lanjut dari dinamika perubahan kurikulum dan tantangan global, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar sebagai strategi reformasi pendidikan nasional. Kebijakan ini bertujuan memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan dalam merancang proses pembelajaran yang lebih kontekstual, adaptif, dan berpusat pada peserta didik (Kemendikbudristek, 2020). Merdeka Belajar menekankan pentingnya otonomi sekolah, penyederhanaan administrasi, serta penguatan kompetensi esensial yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Salah satu implementasi konkret dari kebijakan tersebut adalah penerapan Kurikulum Merdeka, yang secara resmi diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Permendikbudristek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Permendikbudristek Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi. Kurikulum ini dirancang untuk memberikan keleluasaan kepada guru dalam menentukan strategi pembelajaran

yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan kondisi satuan pendidikan. Penguatan implementasi Kurikulum Merdeka kemudian ditegaskan melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa kerangka dasar kurikulum memuat pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*) sebagai salah satu landasan dalam pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan.

Sebagai bagian dari transformasi pendidikan nasional, pemerintah mendorong penerapan pembelajaran *deep learning* sebagai pendekatan yang mendukung terwujudnya pembelajaran bermakna (*meaningful learning*), sadar (*mindful learning*), dan menyenangkan (*joyful learning*). Pendekatan ini bertujuan membentuk peserta didik yang mampu memahami konsep secara mendalam, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, serta mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam kehidupan nyata. *Deep learning* bukan merupakan kurikulum baru, melainkan pendekatan pembelajaran yang memperkuat implementasi Kurikulum Merdeka melalui pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan berorientasi pada pengembangan kompetensi. Hal tersebut sejalan dengan Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 yang menetapkan pendekatan pembelajaran mendalam sebagai bagian dari kerangka dasar kurikulum dengan tujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan, kewargaan, penalaran kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi peserta didik sebagai pelajar sepanjang hayat yang berkarakter

Pancasila melalui pembelajaran mendalam. Dengan demikian, implementasi *deep learning* merupakan penguatan terhadap pelaksanaan Kurikulum Merdeka, bukan penggantian kurikulum yang telah berlaku.

Di tingkat daerah, implementasi pembelajaran tersebut didukung oleh Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Sembilan Keterampilan Kunci Hidup Sukses Peserta Didik di Kabupaten Bojonegoro. Peraturan ini menegaskan bahwa proses pembelajaran diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, refleksi, serta pembelajaran berbasis proyek (*Project Based Learning*) sebagai bagian dari pengembangan kompetensi peserta didik. Selain itu, guru diwajibkan melaksanakan refleksi pembelajaran, sedangkan satuan pendidikan bertanggung jawab melakukan evaluasi dan pengembangan pembelajaran secara berkelanjutan. Sebagai bentuk implementasi kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro juga melaksanakan penguatan kapasitas guru melalui Komunitas Belajar (Kombel) dan kegiatan MGMP, salah satunya melalui Workshop Pembelajaran Mendalam (*Deep Learning*) pada tahun 2025. Kegiatan ini menunjukkan bahwa implementasi *deep learning* telah mulai diterapkan di lingkungan pendidikan Kabupaten Bojonegoro melalui peningkatan kompetensi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang lebih bermakna dan berpusat pada peserta didik.

Dalam konteks pendidikan, istilah *deep learning* tidak merujuk pada teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), melainkan pada pendekatan pembelajaran yang menekankan pemahaman konseptual secara

mendalam dan bermakna. *Deep learning* dalam pendidikan dipahami sebagai proses belajar yang memungkinkan peserta didik menghubungkan pengetahuan baru dengan pengalaman sebelumnya, menganalisis informasi secara kritis, serta mampu mengaplikasikan konsep dalam situasi yang berbeda (Marton & Säljö, 1976). Berbeda dengan *surface learning* yang cenderung berorientasi pada hafalan dan reproduksi informasi, pembelajaran mendalam mendorong peserta didik untuk memahami makna, mengevaluasi gagasan, serta membangun pengetahuan secara reflektif. Dengan demikian, *deep learning* menempatkan peserta didik sebagai subjek aktif yang terlibat dalam proses berpikir tingkat tinggi.

Secara konseptual, pendekatan *deep learning* sangat erat kaitannya dengan pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah (*problem solving*). Kemampuan tersebut merupakan bagian dari *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) yang mencakup keterampilan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta sebagaimana dijelaskan dalam revisi Taksonomi Bloom oleh Anderson dan Krathwohl (2001). Pembelajaran yang berorientasi pada HOTS bertujuan membentuk peserta didik yang tidak hanya memahami materi secara tekstual, tetapi mampu menginterpretasikan, mengintegrasikan, dan mentransformasikan pengetahuan dalam konteks nyata. Selain itu, *deep learning* juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan pendekatan *Project Based Learning* (PjBL), karena melalui pembelajaran berbasis proyek peserta didik didorong untuk melakukan eksplorasi, investigasi, kolaborasi, dan refleksi secara mendalam terhadap suatu

permasalahan (Thomas, 2000). Dengan demikian, secara teoretis *deep learning* menjadi pendekatan pembelajaran yang relevan dengan arah Kurikulum Merdeka yang menekankan pembelajaran bermakna, kontekstual, dan berbasis kompetensi.

Dalam konteks implementasi kebijakan di tingkat satuan pendidikan, SMP Negeri 1 Kedewan sebagai salah satu sekolah menengah pertama di Kabupaten Bojonegoro telah mulai menerapkan Kurikulum Merdeka sebagai bagian dari kebijakan nasional Merdeka Belajar. Implementasi tersebut ditunjukkan melalui penyusunan perangkat ajar yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran, pengembangan modul ajar, penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, serta pelaksanaan asesmen yang berorientasi pada penguatan kompetensi peserta didik. Sejalan dengan perkembangan kebijakan pendidikan, sekolah juga mulai mengimplementasikan pendekatan pembelajaran *deep learning* dalam kegiatan pembelajaran intrakurikuler sebagai upaya menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna, mendalam, dan mendorong kemampuan berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, serta kemampuan memecahkan masalah sesuai dengan karakteristik peserta didik.

Selain mengacu pada kebijakan nasional, implementasi pembelajaran di SMP Negeri 1 Kedewan juga didukung oleh kebijakan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Sembilan Keterampilan Kunci Hidup Sukses Peserta Didik di Kabupaten Bojonegoro. Peraturan tersebut mengamanatkan bahwa proses pembelajaran harus mampu mengembangkan keterampilan berpikir

kritis, komunikasi, kolaborasi, kreativitas, refleksi, serta pembelajaran berbasis proyek (*Project Based Learning*) sebagai bagian dari pengembangan kompetensi peserta didik. Selain itu, guru diwajibkan melaksanakan refleksi pembelajaran, sedangkan kepala sekolah dan seluruh unsur pendidikan bertanggung jawab melakukan evaluasi serta pengembangan pembelajaran secara berkelanjutan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro memiliki arah yang selaras dengan karakteristik pembelajaran *deep learning*, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, mendorong berpikir kritis, kolaboratif, reflektif, dan berbasis pemecahan masalah.

Tabel 1.

Kondisi Sumber Daya Manusia SMP Negeri 1 Kedewan Tahun Pelajaran 2025/2026

No	Jenis Sumber Daya	Jumlah
1	Tenaga Pendidik (Guru)	23 Orang
2	Tenaga Kependidikan	7 Orang
3	Peserta Didik	371 Siswa

Sumber : Data sekunder SMPN 1 Kedewan, 2026

Berdasarkan data kondisi sumber daya manusia di SMP Negeri 1 Kedewan, dapat diketahui bahwa jumlah tenaga pendidik sebanyak 23 orang, tenaga kependidikan sebanyak 7 orang, dan jumlah peserta didik sebanyak 371 siswa pada tahun pelajaran 2025/2026. Data tersebut menunjukkan bahwa proses pembelajaran di SMP Negeri 1 Kedewan melibatkan jumlah peserta didik yang cukup besar dibandingkan dengan jumlah tenaga pendidik yang tersedia.

Kondisi tersebut menuntut guru untuk mampu mengelola pembelajaran secara efektif, terutama dalam implementasi pembelajaran *deep learning* yang menekankan keterlibatan aktif peserta didik, kemampuan berpikir kritis, kolaborasi, serta pembelajaran berbasis pemecahan masalah. Dalam implementasinya, guru tidak hanya dituntut menyampaikan materi pembelajaran, tetapi juga mampu membangun pembelajaran yang reflektif, kontekstual, dan berbasis Higher Order Thinking Skills (HOTS).

Selain itu, berdasarkan observasi awal peneliti, kemampuan guru dalam memanfaatkan teknologi pembelajaran dan menerapkan pembelajaran berbasis proyek masih belum merata. Sebagian guru telah mampu menggunakan media pembelajaran digital dan menerapkan pembelajaran berbasis proyek, sedangkan sebagian lainnya masih mengalami kesulitan dalam penggunaan platform digital, penyusunan pembelajaran berbasis HOTS, serta pengelolaan kelas kolaboratif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting dalam implementasi pembelajaran *deep learning* di SMP Negeri 1 Kedewan. Selain kompetensi guru, kesiapan sumber daya juga ditunjukkan melalui adanya program pengembangan profesional yang diselenggarakan oleh sekolah, seperti pelatihan, *workshop*, Komunitas Belajar (Kombel), dan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). Kegiatan-kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru dalam memahami konsep serta menerapkan pembelajaran *deep learning* sesuai dengan karakteristik Kurikulum Merdeka.

Tabel 2.**Kondisi Sarana dan Prasarana Pendukung Pembelajaran Digital di SMP Negeri 1 Kedewan**

No	Sarana dan Prasarana	Kondisi
1	Laboratorium Komputer	Tersedia
2	Jaringan Internet Sekolah	Tersedia
3	LCD Proyektor	Tersedia
4	Media Pembelajaran Multimedia	Tersedia
5	Perangkat Pembelajaran Digital	Belum Merata
6	Akses Teknologi di Setiap Kelas	Belum Optimal

Sumber : Data SMP Negeri 1 Kedewan Tahun 2025/2026
(diolah peneliti, 2026)

Berdasarkan data sarana dan prasarana di SMP Negeri 1 Kedewan, sekolah telah memiliki beberapa fasilitas penunjang pembelajaran digital seperti laboratorium komputer, jaringan internet sekolah, LCD proyektor, serta perangkat pembelajaran berbasis multimedia. Keberadaan fasilitas tersebut menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya mendukung implementasi pembelajaran berbasis teknologi sebagai bagian dari pelaksanaan Kurikulum Merdeka.

Namun demikian, keterbatasan jumlah perangkat dan belum meratanya akses teknologi di setiap ruang kelas menyebabkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran belum berjalan secara optimal. Dalam praktik pembelajaran sehari-hari, penggunaan media pembelajaran digital masih terbatas pada mata pelajaran tertentu dan belum diterapkan secara konsisten oleh seluruh guru. Padahal, implementasi pembelajaran deep learning

membutuhkan dukungan teknologi, media interaktif, serta lingkungan belajar yang mampu mendorong eksplorasi dan keterlibatan aktif peserta didik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran digital masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi pembelajaran *deep learning* di SMP Negeri 1 Kedewan.

Berdasarkan hasil observasi awal peneliti di SMP Negeri 1 Kedewan, implementasi pembelajaran yang mengarah pada pendekatan *deep learning* telah mulai diterapkan melalui penggunaan metode *Project Based Learning* (PjBL), diskusi kelompok, presentasi digital, serta penugasan berbasis pemecahan masalah pada beberapa mata pelajaran. Namun demikian, penerapan tersebut belum dilakukan secara merata oleh seluruh guru. Sebagian guru masih menggunakan metode pembelajaran konvensional yang berfokus pada penyampaian materi dan penugasan berbasis hafalan. Selain itu, penggunaan media pembelajaran digital dalam proses pembelajaran juga masih terbatas pada mata pelajaran tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran *deep learning* di SMP Negeri 1 Kedewan masih berada pada tahap adaptasi dan belum sepenuhnya terintegrasi secara sistematis dalam seluruh proses pembelajaran. di mana saya menambahkan ini.

Dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah, ketersediaan sumber daya manusia serta jumlah peserta didik merupakan faktor penting yang memengaruhi efektivitas proses pembelajaran. Sumber daya manusia di sekolah meliputi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berperan dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan administrasi pendidikan. Selain

itu, jumlah peserta didik juga menjadi salah satu indikator penting dalam pengelolaan pembelajaran di kelas. Menurut (Mulyasa, 2018), keberhasilan proses pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia serta kondisi peserta didik yang menjadi sasaran pendidikan. Oleh karena itu, untuk mengetahui kondisi tersebut, perlu ditampilkan data mengenai jumlah tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta peserta didik di SMP Negeri 1 Kedewan. Data tersebut dapat memberikan gambaran mengenai kapasitas sekolah dalam mendukung pelaksanaan pembelajaran, termasuk dalam implementasi pembelajaran *deep learning*.

Salah satu pendekatan pembelajaran yang sejalan dengan Kurikulum Merdeka adalah pembelajaran *deep learning*, yaitu pembelajaran yang menekankan pada pemahaman konsep secara mendalam, kemampuan berpikir kritis, serta kemampuan memecahkan masalah. Dengan jumlah siswa yang cukup banyak, penerapan pembelajaran *deep learning* menjadi tantangan tersendiri bagi guru, karena membutuhkan kesiapan sumber daya manusia, metode pembelajaran yang tepat, serta dukungan sarana dan prasarana pembelajaran. Selain itu, keberadaan tenaga kependidikan yang berjumlah 7 orang juga memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran kegiatan administrasi dan operasional sekolah. Dukungan tenaga kependidikan yang memadai dapat membantu terciptanya lingkungan belajar yang kondusif sehingga proses implementasi kebijakan pendidikan dapat berjalan dengan lebih efektif. Keberhasilan implementasi pembelajaran *deep learning* tidak hanya ditentukan oleh jumlah sumber daya yang dimiliki sekolah, tetapi juga

oleh kualitas dan kesiapan sumber daya tersebut dalam mendukung proses pembelajaran.

Tabel 3.
Implementasi Awal Pembelajaran *Deep Learning* dan Relevansinya dengan Teori Edward III di SMP Negeri 1 Kedewan

No	Bentuk Implementasi	Kondisi Pelaksanaan	Permasalahan yang Tampak	Relevansi dengan Indikator Edward III
1	<i>Project Based Learning</i> (PjBL)	Mulai diterapkan	Belum seluruh guru mampu menerapkan pembelajaran berbasis proyek secara konsisten	Disposisi – menunjukkan kesiapan dan komitmen pelaksana kebijakan masih belum merata
2	Diskusi Kelompok	Dilaksanakan pada beberapa mata pelajaran	Pembelajaran kolaboratif belum diterapkan pada seluruh proses pembelajaran	Disposisi – implementasi pembelajaran aktif masih bergantung pada inisiatif guru
3	Presentasi Digital	Sudah digunakan	Penggunaan media digital masih terbatas pada guru tertentu	Sumber Daya – kemampuan literasi digital guru belum merata
4	Penugasan Berbasis Pemecahan Masalah	Mulai diterapkan	Pembelajaran berbasis HOTS belum optimal pada semua mata pelajaran	Disposisi – pemahaman guru terhadap konsep deep learning masih berbeda
5	Pembelajaran Berbasis HOTS	Belum merata	Sebagian guru masih menggunakan pembelajaran berbasis hafalan	Komunikasi – pemahaman implementasi deep learning belum sepenuhnya tersampaikan
6	Penggunaan Media Digital	Masih terbatas pada mata pelajaran tertentu	Integrasi teknologi pembelajaran belum berjalan secara konsisten	Sumber Daya – keterbatasan kompetensi dan fasilitas pendukung pembelajaran digital
7	Pembelajaran Konvensional	Masih digunakan sebagian guru	Proses pembelajaran masih berpusat pada guru	Disposisi – adanya resistensi atau adaptasi yang belum optimal terhadap

No	Bentuk Implementasi	Kondisi Pelaksanaan	Permasalahan yang Tampak	Relevansi dengan Indikator Edward III
				pembelajaran deep learning
8	Sosialisasi Pembelajaran Deep Learning	Dilakukan melalui rapat dan pelatihan internal	Masih terdapat perbedaan pemahaman guru mengenai konsep deep learning	Komunikasi – penyampaian kebijakan belum efektif dan belum dipahami secara menyeluruh
9	Pedoman Implementasi Deep Learning	Belum terdapat SOP khusus	Pelaksanaan pembelajaran dilakukan berdasarkan pemahaman masing-masing guru	Struktur Birokrasi – belum adanya mekanisme dan standar implementasi yang terstruktur

Berdasarkan tabel implementasi awal pembelajaran deep learning di SMP Negeri 1 Kedewan, dapat diketahui bahwa sekolah telah mulai menerapkan beberapa bentuk pembelajaran yang mengarah pada pendekatan deep learning, seperti *Project Based Learning* (PjBL), diskusi kelompok, presentasi digital, dan penugasan berbasis pemecahan masalah. Namun demikian, implementasi tersebut belum berjalan secara optimal dan merata pada seluruh mata pelajaran.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi pembelajaran *deep learning* di SMP Negeri 1 Kedewan masih memerlukan penguatan pada aspek sumber daya manusia, komunikasi kebijakan, dukungan sarana prasarana, serta mekanisme implementasi agar tujuan pembelajaran mendalam dalam Kurikulum Merdeka dapat tercapai secara optimal.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia yang ada di SMP Negeri 1 Kedewan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung implementasi pembelajaran *deep learning*. Namun

demikian, dengan jumlah siswa yang relatif besar, diperlukan pengelolaan pembelajaran yang baik serta koordinasi yang efektif antara pihak sekolah, guru, dan tenaga kependidikan agar tujuan pembelajaran dalam Kurikulum Merdeka dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, kondisi ini menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam penelitian mengenai implementasi pembelajaran *deep learning* di SMP Negeri 1 Kedewan Bojonegoro ditinjau dari teori implementasi kebijakan George C. Edward III, khususnya pada aspek komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan pembelajaran.

Selain itu, terdapat upaya integrasi teknologi dalam proses pembelajaran sebagai bentuk adaptasi terhadap transformasi digital pendidikan. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis digital, penggunaan perangkat presentasi interaktif, serta pengenalan platform pembelajaran daring menjadi bagian dari strategi sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Di samping itu, praktik pembelajaran berbasis proyek mulai diterapkan dalam beberapa mata pelajaran, di mana peserta didik dilibatkan dalam kegiatan eksplorasi, diskusi kelompok, serta penyelesaian tugas berbasis masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara normatif dan operasional, sekolah telah berupaya menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam praktik pembelajaran di tingkat lokal. Namun, sejauh mana implementasi tersebut benar-benar mencerminkan pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*) masih memerlukan analisis lebih lanjut secara sistematis.

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa integrasi teknologi dan penerapan Kurikulum Merdeka di sekolah memang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Penelitian Rahmawati (2022) menunjukkan bahwa implementasi Kurikulum Merdeka telah berjalan, tetapi belum optimal karena keterbatasan kesiapan guru dan sarana pendukung pembelajaran. Penelitian Lestari (2021) juga menemukan bahwa integrasi teknologi dalam pembelajaran mampu meningkatkan keterlibatan siswa, namun masih terkendala pada perbedaan kompetensi digital guru dan keterbatasan fasilitas TIK di sekolah. Sementara itu, penelitian Suryadi dan Wicaksono (2023) menunjukkan bahwa pendekatan *deep learning* dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa, tetapi keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kesiapan guru dan metode pembelajaran yang digunakan.

Berdasarkan temuan penelitian terdahulu tersebut, dapat dipahami bahwa penerapan pembelajaran berbasis teknologi dan pembelajaran mendalam membutuhkan kesiapan sumber daya, pemahaman guru, serta dukungan organisasi sekolah yang memadai. Oleh karena itu, meskipun SMP Negeri 1 Kedewan telah berupaya menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran, sejauh mana implementasi tersebut benar-benar mencerminkan pendekatan pembelajaran mendalam (*deep learning*) masih memerlukan analisis lebih lanjut secara sistematis.

Dengan menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan Edward III (George C. Edward III, 1980), permasalahan yang ditemukan dalam penerapan pembelajaran *deep learning* di sekolah dapat dianalisis secara sistematis. Keempat variabel tersebut memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung maupun penghambat implementasi kebijakan pembelajaran *deep learning*, sehingga dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaannya di tingkat satuan pendidikan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah banyak mengkaji pembelajaran berbasis digital, integrasi teknologi dalam proses pembelajaran, serta efektivitas penerapan Kurikulum Merdeka di berbagai jenjang pendidikan. Kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada aspek pedagogis, seperti peningkatan hasil belajar, motivasi siswa, maupun pengaruh penggunaan media digital terhadap keterampilan berpikir kritis. Namun demikian, penelitian yang secara spesifik membahas konsep *deep learning* sebagai pendekatan pembelajaran mendalam di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) masih relatif terbatas. Sebagian besar studi mengenai *deep learning* lebih banyak dikaitkan dengan konteks teknologi kecerdasan buatan atau pembelajaran di tingkat pendidikan tinggi, sehingga kajian empiris pada jenjang SMP sebagai bagian dari implementasi kebijakan pendidikan belum banyak dilakukan.

Selain itu, penelitian mengenai pembelajaran mendalam pada umumnya dianalisis dari perspektif teori pendidikan atau psikologi belajar, dan belum banyak yang menggunakan perspektif teori implementasi kebijakan

publik sebagai pisau analisis. Padahal, penerapan Kurikulum Merdeka dan pendekatan pembelajaran *deep learning* merupakan bagian dari kebijakan pendidikan nasional yang pelaksanaannya dipengaruhi oleh faktor organisasi, sumber daya, komunikasi, dan struktur birokrasi di sekolah. Dengan demikian, terdapat kekosongan akademik dalam mengkaji implementasi pembelajaran *deep learning* di tingkat SMP dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan, khususnya model George C. Edward III (George C. Edward III, 1980). Kekosongan inilah yang menjadikan penelitian ini memiliki relevansi dan kontribusi ilmiah, baik dalam pengembangan kajian administrasi publik maupun dalam praktik kebijakan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Berdasarkan uraian konseptual dan empiris yang telah dipaparkan, dapat dipahami bahwa implementasi pembelajaran *deep learning* di tingkat satuan pendidikan merupakan bagian dari proses penerjemahan kebijakan nasional ke dalam praktik pembelajaran di sekolah. Namun demikian, keberhasilan implementasi tersebut tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan secara normatif, melainkan oleh berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara mendalam bagaimana pembelajaran *deep learning* diimplementasikan, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat yang memengaruhi efektivitasnya. Analisis ini diperlukan agar dapat diketahui sejauh mana kebijakan Kurikulum Merdeka benar-benar terwujud dalam

praktik pembelajaran yang bermakna dan berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik.

Berdasarkan berbagai kondisi tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi pembelajaran *deep learning* di SMP Negeri 1 Kedewan masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek kesiapan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi pembelajaran, maupun mekanisme pelaksanaan kebijakan di tingkat sekolah. Meskipun secara normatif Kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan berbasis kompetensi, dalam praktiknya implementasi pembelajaran *deep learning* belum sepenuhnya berjalan optimal dan terstruktur. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menganalisis bagaimana implementasi pembelajaran *deep learning* dilaksanakan serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis “IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN *DEEP LEARNING* DI SMP NEGERI 1 KEDEWAN BOJONEGORO”.

B. PERUMUSAN MASALAH

Pada dasarnya suatu penelitian dilakukan berdasarkan tujuan awal yang dimiliki oleh peneliti, yaitu untuk memperoleh data yang selanjutnya digunakan sebagai bahan dalam memecahkan permasalahan yang terdapat dalam topik penelitian. Setiap penelitian yang akan dilakukan harus didasarkan pada adanya masalah yang ditemukan melalui proses pengamatan awal maupun kajian teoritis. Walaupun diakui bahwa menemukan dan merumuskan masalah penelitian merupakan salah satu tahap yang paling sulit dalam proses

penelitian (Tuckman, 1988). Namun apabila peneliti telah menemukan suatu masalah yang relevan dan signifikan, maka dapat dikatakan bahwa separuh proses penelitian telah terselesaikan karena arah penelitian menjadi lebih jelas dan terarah.

Dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan, permasalahan seringkali muncul ketika terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan secara normatif dengan realitas pelaksanaannya di lapangan. Apabila dalam pelaksanaan pembelajaran *deep learning* sebagai bagian dari kebijakan Kurikulum Merdeka masih ditemukan hambatan atau penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan, maka kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai suatu masalah penelitian. Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan permasalahan yang harus dicari jawaban melalui proses pengumpulan dan analisis data (Sugiyono, 2019). Berdasarkan teori tentang rumusan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan diidentifikasi dalam penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi pembelajaran *deep learning* di SMP Negeri 1 Kedewan Bojonegoro?

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Peneliti

Menurut (Sugiyono, 2018) tujuan penelitian yaitu agar data dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan. Hasil dari penelitian diharapkan mampu menghasilkan suatu pengetahuan baru yang dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian. Tujuan penelitian merupakan arah yang ingin

dicapai oleh peneliti dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi pembelajaran *deep learning* di SMP Negeri 1 Kedewan Bojonegoro.

2. Kegunaan Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018) manfaat penelitian adalah jawaban atas tujuan penelitian yang dibahas dalam hasil penelitian, guna mendapatkan sistem pengetahuan dalam memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang sudah dirumuskan didalam topik penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan harapan menghasilkan informasi yang rinci, akurat dan aktual yang dapat memberikan manfaat dalam menjawab permasalahan yang diteliti. Kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Secara teoretis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman konseptual untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi pembelajaran *deep learning* di SMP Negeri 1 Kedewan Bojonegoro, dengan menelaah aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam

pelaksanaan kebijakan pembelajaran tersebut berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III.

b. Secara praktis

1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mahasiswa mengenai untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi pembelajaran *deep learning* di SMP Negeri 1 Kedewan Bojonegoro, dengan menelaah aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan pembelajaran tersebut berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III., serta menjadi sarana penerapan teori yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik penelitian ilmiah.

2) Bagi Perguruan Tinggi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi akademik dan sumber pengembangan keilmuan di bidang administrasi publik dan kesejahteraan sosial, serta memperkaya khazanah penelitian ilmiah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik di tingkat daerah.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Dalam penulisan penelitian ini, diperlukan sistematika penulisan agar dapat memudahkan pembaca dalam menguraikan objek penelitian dan juga memudahkan pembaca dalam memahami pembahasan yang terdapat dalam

penulisan ini, maka susunan sistematika penulisan penelitian ini adalah :

i. BAB I PENDAHULUAN

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang didalamnya menguraikan isi berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

ii. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab dua, merupakan bab dimana penulisan menguraikan tentang teori, konsep terkait dengan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi pembelajaran *deep learning* di SMP Negeri 1 Kedewan Bojonegoro, dengan menelaah aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan pembelajaran tersebut berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Dalam bab dua ini juga menguraikan tentang penelitian terdahulu.

iii. BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga, merupakan bab yang membahas mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga uraian didalamnya meliputi, jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, manajemen data, serta teknik analisis data.

iv. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab empat, merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan dimana didalamnya menguraikan mengenai hasil yang diperoleh dari penelitian mengenai. Bagaimana untuk menganalisis dan mendeskripsikan

implementasi pembelajaran *deep learning* di SMP Negeri 1 Kedewan Bojonegoro, dengan menelaah aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan pembelajaran tersebut berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edward III.

v. BAB V PENUTUP

Bab lima, merupakan bab penutup dimana bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran yang dianggap perlu dalam penelitian yang dilakukan. Dengan adanya bab penutup, pembaca dapat memperoleh gambaran ringkas tentang hasil penelitian dan rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian tersebut.

